

**DINAMIKA PENGGUNAAN BANTENG  
DALAM LAMBANG PARTAI-PARTAI POLITIK  
(1955-1999):  
KAJIAN SEJARAH VISUAL**

*Dynamic Use of Bulls in The Symbols of Political Parties 1955-1999:  
A Study of Visual History*

Oleh **Reiza D. Dienaputra**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor  
[reizaputra@yahoo.com](mailto:reizaputra@yahoo.com), [reizaputra@unpad.ac.id](mailto:reizaputra@unpad.ac.id)

*Naskah Diterima: 20 April 2012*

*Naskah Disetujui: 14 Mei 2012*

**Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk merekonstruksi penggunaan banteng sebagai elemen visual dalam lambang partai-partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999. Berbagai permasalahan berkaitan dengan keberadaan banteng dalam lambang partai-partai politik diungkap, seperti dinamika visualisasi banteng, eksplanasi sejarah dan budaya, serta pengaruh sistem politik terhadap visualisasi banteng dalam lambang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode sejarah, yang di dalamnya meliputi tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sebagai sebuah kajian sejarah visual, sumber utama yang digunakan adalah lambang partai-partai politik. Selanjutnya, untuk menganalisis penggunaan banteng dalam lambang partai-partai politik digunakan pendekatan seni dan disain, pendekatan politik dan pendekatan kebudayaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan banteng sebagai elemen visual dalam lambang memiliki akar sejarah yang panjang. Secara budaya banteng pun merupakan binatang yang akrab dengan banyak suku bangsa di tanah air. Sebagai elemen visual, penggunaan banteng dalam lambang partai politik pada umumnya hanya digunakan oleh partai-partai politik beraliran nasionalis. Namun demikian, representasi visual banteng dalam lambang mengalami dinamika yang menarik, tidak hanya karena kebutuhan partai politik tetapi juga disebabkan pengaruh sistem politik yang berlaku.

**Kata Kunci:** lambang partai politik, banteng, sejarah visual.

**Abstract**

*This study aims to reconstruct the use of bulls as visual element in the symbols of political parties that were voted in the legislative (DPR) during 1955-1999 general election. The author reveals many dynamic use of bulls in political parties, including its visualization, historical and cultural explanation, and political system that influenced bull visualization on the symbols. The author conducts history method, covering critique,*

*interpretation, and historiography. As a study of visual history, the research objects are the symbols of political parties. We approach the problem from many angles, including art and design, as well as political and cultural ones. The result finds that the use of bull as visual element in the symbol of political parties has a long root in the history of this country. Culturally, bulls are very familiar to many ethnic group in Indonesia, and generally they are used by nationalist parties. Nevertheless, visual representation of bulls has experienced an interesting dynamics: using bulls as symbol is not only for the benefit of certain political parties but it is also influenced by the political system applied at a certain time.*

**Keywords:** *symbol of political parties, bulls, visual history.*

#### A. PENDAHULUAN

Penggunaan sumber visual dalam merekonstruksi sejarah Indonesia dapat dikatakan belum banyak dilakukan. Padahal, penggunaan sumber visual dalam rekonstruksi sejarah akan memberikan warna baru bagi kisah sejarah yang dihasilkan, yaitu kisah sejarah yang dapat dikategorikan sebagai sejarah visual. Dalam kaitan itu, pengamatan tentang eksistensi partai-partai politik di Indonesia melalui penggunaan sumber visual diharapkan dapat memberikan konstruk baru tentang wajah partai-partai politik dalam panggung sejarah Indonesia. Sumber visual terpilih yang digunakan dalam mengamati salah satu episode perjalanan partai-partai politik di Indonesia adalah lambang partai-partai politik.

Keberadaan lambang bagi partai politik di Indonesia tidak saja sebagai representasi identitas partai politik, tetapi sekaligus pula sebagai bentuk pemenuhan serta ketaatan partai politik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tegasnya, keharusan partai politik memiliki lambang selalu ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setiap menjelang diadakannya Pemilu, mulai Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999 (Undang Undang No. 7 Tahun 1953; Undang Undang No. 5 Tahun 1969; Undang Undang No. 3 Tahun 1975; Undang Undang No. 3 Tahun 1985; Undang Undang No. 2 Tahun 1999). Tanpa kepemilikan lambang, dapat dikatakan tertutup peluang bagi partai

politik untuk berpartisipasi sekaligus berkompetisi dalam Pemilu.

Seiring dengan jatuh banggunya partai politik, terjadi pula muncul tenggelamnya lambang partai-partai politik. Kemunculan lambang yang menyertai kemunculan sebuah partai politik tentu tidak sekedar memperlihatkan kelahiran sebuah partai politik baru, tetapi juga memperlihatkan lahirnya sebuah lambang baru partai politik. Lambang partai-partai politik menyajikan banyak hal menarik yang dapat diamati. Lambang partai-partai politik tidak saja merepresentasikan eksistensi dan identitas partai politik tetapi merepresentasikan pula sistem politik yang tengah berlaku. Lambang partai-partai politik tidak sekedar ingin merepresentasikan citra partai politik, tetapi bisa jadi juga ingin merepresentasikan sesuatu yang dipandang akrab dengan memori visual masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, jelaslah lambang partai-partai politik merupakan objek kajian yang menarik untuk diamati. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada keberadaan banteng sebagai elemen visual dalam lambang partai-partai politik. Namun demikian, mengingat demikian banyaknya lambang partai-partai politik yang ada di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang (2012), maka kajian tentang penggunaan banteng dalam lambang partai-partai politik dibatasi pada lambang partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu, mulai Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999. Secara

lebih khusus lagi objek kajian diarahkan pada lambang partai-partai politik yang berhasil meraih kursi DPR mulai Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999.

Pokok masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan dinamika penggunaan banteng dalam lambang partai-partai politik di Indonesia. Masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan banteng sebagai lambang partai-partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999?
2. Bagaimana pola visualisasi banteng dalam lambang partai-partai politik peraih kursi DPR dalam Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999?
3. Mengapa banteng dipilih sebagai elemen visual dalam lambang partai-partai politik peraih kursi DPR dalam Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999?

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan utama penelitian ini adalah untuk membahas tentang dinamika penggunaan banteng sebagai elemen visual lambang partai-partai politik di Indonesia, yaitu:

1. membahas penggunaan banteng sebagai elemen visual dalam lambang partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999;
2. mengungkap pola visualisasi banteng dalam lambang partai-partai politik peraih kursi DPR dalam Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999;
3. memberikan eksplanasi alasan penggunaan banteng sebagai elemen visual pada lambang partai-partai politik peraih kursi DPR dalam Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999.

Berpijak pada fokus penelitian tersebut, maka lambang partai-partai politik yang menjadi objek penelitian ini, adalah, 26 lambang partai politik pada Pemilu 1955, 8 lambang partai politik pada Pemilu

1971, 3 lambang partai politik pada Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997, dan 19 lambang partai politik pada Pemilu 1999. Perlu dijelaskan, partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1955 berjumlah 27 partai politik, namun satu partai politik, yakni Partai Persatuan Daya, lambangnya tidak berhasil ditemukan.

Penelitian masalah tersebut menggunakan metode sejarah, yang mencakup empat tahapan kerja, yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kegiatan heuristik atau pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber visual melalui studi kepustakaan di berbagai perpustakaan serta pusat-pusat informasi, seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, Perpustakaan ISI Yogyakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, dan Pusat Informasi Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Untuk memperkuat studi pustaka, dilakukan studi kearsipan di lembaga-lembaga kearsipan, seperti Badan Kearsipan Daerah Jawa Barat di Bandung, Badan Perpustakaan Arsip Daerah Yogyakarta, dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

Tahapan kedua atau tahapan kritik dilakukan dengan cara melakukan kritik atas sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan, khususnya sumber-sumber visual berupa lambang partai-partai politik. Dengan kata lain, kritik berkaitan dengan verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber yang digunakan. Kritik dilakukan secara eksternal (kritik eksternal) dan internal (kritik internal). Kritik eksternal adalah metode verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek "luar" dari sumber sejarah atau dapat pula dipahami sebagai suatu verifikasi atas asal usul sumber. Kritik eksternal mencakup dua hal penting, yakni, masalah otentisitas sumber dan integritas sumber sejarah. Kritik internal, sebaliknya merupakan metode verifikasi

atau pengujian terhadap aspek-aspek "dalam" dari sumber sejarah. Kritik internal mencakup dua hal penting yakni keakuratan (*accuracy*) sumber dan kredibilitas sumber. Dengan demikian, kritik internal difokuskan pada pengujian atau verifikasi terhadap isi atau substansi dari sumber (Sjamsuddin, 2007: 131-134, 143). Hasil kritik terhadap sumber sejarah adalah berupa fakta, yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan atau rekonstruksi ceritera sejarah (Kartodirdjo, 1992: 16).

Tahapan ketiga atau interpretasi merupakan kegiatan penafsiran atas fakta-fakta sejarah sebagaimana yang dihasilkan dalam tahapan kritik sumber. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis merupakan kegiatan interpretasi dengan cara menguraikan, sedangkan sintesis merupakan kegiatan interpretasi dengan cara menyatukan (Kuntowijoyo, 1995: 100-102). Selanjutnya, untuk menganalisis sumber visual, pada tahapan interpretasi digunakan pula metode *content analysis*. Metode *content analysis* berbasiskan pada penghitungan frekuensi kemunculan elemen visual tertentu yang terdapat dalam suatu gambar yang dijadikan sampel penelitian dan kemudian melakukan analisis atas frekuensi kemunculan elemen visual tersebut. Setidaknya ada empat tahapan kerja yang ditempuh dalam mengaplikasikan metode *content analysis*. Pertama, menetapkan sampel gambar (*finding images*). Kedua, menentukan atau menetapkan kategori pengkodean yang terdapat dalam gambar (*devising categories for coding*). Ketiga, melaksanakan pengkodean terhadap gambar berdasarkan kode-kode yang telah ditetapkan (*coding the images*). Keempat, menganalisis hasil pengkodean (*analysing the results*) (Rose, 2007: 59-73).

Tahapan kerja terakhir, yakni historiografi, merupakan tahapan penulisan peristiwa sejarah sebagai sebuah kisah. Aspek terpenting dalam tahapan ini adalah aspek kronologis (Kuntowijoyo, 1995:

102-103). Untuk memberikan eksplanasi tentang penggunaan banteng dalam lambang partai-partai politik yang menyangkut faktor-faktor kausal (*causal explanation*), kondisional, dan kontekstual (Kartodirdjo, 1992: 2), digunakan pendekatan seni dan desain, serta konsep dan teori politik dan kebudayaan. Pendekatan seni dan desain digunakan untuk membedah elemen visual yang terdapat dalam lambang partai-partai politik. Pendekatan politik di antaranya digunakan untuk memahami partai politik serta sistem politik yang mempengaruhi visualisasi lambang partai-partai politik. Pendekatan kebudayaan digunakan untuk memahami latar budaya yang berpengaruh terhadap visualisasi banteng dalam lambang partai-partai politik.

Berkaitan dengan ranah visual, setidaknya terdapat empat elemen visual yang perlu diperhatikan, yakni, *line* (garis), *shape* (bentuk), *light and dark* (terang dan gelap), serta *color* (warna) (Feldman, 1967: 222-255). Dari keempat elemen visual tersebut, kajian ini memberi fokus pada bentuk dan warna yang terdapat pada lambang. Dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan Tinarbuko, kajian terhadap bentuk lambang lebih difokuskan pada *logogram*. *Logogram* secara sederhana dapat dimaknai sebagai representasi visualisasi simbol yang terdapat dalam logo atau bagian logo yang dirancang dengan mengedepankan unsur gambar sebagai material utamanya (Tinarbuko, 2009: 24).

## B. HASIL DAN BAHASAN

### 1. Visualisasi Banteng dalam Lambang Partai Politik

Bila dicermati dengan saksama lambang partai-partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999, secara eksplisit gambar banteng selalu muncul secara eksplisit sebagai elemen visual dalam lambang partai-partai politik. Dengan kata lain, banteng merupakan objek yang selalu

terpilih menjadi bentuk yang divisualkan dalam lambang partai-partai politik yang berhasil meraih kursi DPR. Dari 27 partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1955, ada tiga partai politik yang menggunakan banteng sebagai elemen visual dalam lambangnya, yakni, PNI, Partai Buruh, dan Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM). Visualisasi banteng dalam lambang partai-partai politik peraih kursi DPR dalam Pemilu 1955, adalah sebagai berikut.



Gambar 1

Visualisasi banteng dalam lambang partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1955. Sumber: Data Pemilihan Umum 1955 (Jumlah Kursi DPR Tiap Daerah). Koleksi Arsip Pemilihan Umum, 1971-1999, No. Inv. 1321, Jakarta: ANRI; Surat Suara Pemilihan Anggota Konstituante Tahun 1954 Daerah Pemilihan Sumatera Utara; *Harian Daulat Rakjat*, No. 287 Tahun 1955, 13 Mei 1955.

Dalam Pemilu 1971, dari delapan partai politik yang berhasil meraih kursi DPR, hanya satu partai politik yang menggunakan banteng sebagai elemen visual dalam lambangnya, yakni Partai Nasional Indonesia. Visualisasi banteng sebagai lambang Partai Nasional Indonesia, adalah sebagai berikut.



Gambar 2

Visualisasi banteng dalam lambang partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1971.

Sumber:

[www.kpu.go.id/ProPartai/1971/partai\\_1971.shtml](http://www.kpu.go.id/ProPartai/1971/partai_1971.shtml)

Dalam Pemilu 1977, dari tiga partai politik yang berhasil meraih kursi DPR, tercatat hanya satu partai politik yang menggunakan banteng sebagai elemen visual dalam lambangnya, yakni Partai Demokrasi Indonesia. Hal yang sama terjadi pula dalam Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997. Adapun visualisasi banteng dalam lambang Partai Demokrasi Indonesia mulai Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997, terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3

Visualisasi banteng dalam lambang partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1977 dan Pemilu 1982. Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1976 tentang Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya

Yang Dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 serta Penentuan Nomor Urutnya.



Gambar 4 Visualisasi banteng dalam lambang partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997. Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 1986 tentang Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya serta Penentuan Nomornya Masing-masing Yang Digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1987.

Gambar 5 Visualisasi banteng dalam lambang partai politik yang berhasil meraih kursi DPR dalam Pemilu 1999. Sumber: Komisi Pemilihan Umum (t.th.: 35-37); Suryakusuma (t.th.: 596 - 618).

2. Dinamika Visualisasi

Bila gambar banteng yang terdapat dalam lambang partai-partai politik peraih kursi DPR sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999 diamati dengan saksama tampak secara eksplisit adanya dinamika dalam visualisasi banteng. Dinamika tidak hanya tampak pada wujud banteng yang digunakan dalam lambang tetapi juga tampak pada garis dan warna yang digunakan untuk memvisualisasikan lambang. Berkaitan dengan bentuk, banteng yang dalam Pemilu 1955 dan Pemilu 1971 hanya divisualkan dalam bentuk kepala banteng yang tengah menyeruduk, visualisasinya berubah saat banteng digunakan dalam Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997. Dalam Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997, banteng tampil dalam bentuk kepala banteng utuh dengan posisi tegak menghadap ke depan. Bila diperhatikan dengan seksama, visualisasi banteng dalam Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997 memiliki kesamaan kuat dengan visualisasi banteng yang digunakan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Realitas visual ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik pemerintah berkaitan dengan bentuk-bentuk yang boleh digunakan dalam lambang partai-partai politik.

Dalam Pemilu 1999, visualisasi banteng dalam lambang partai-partai politik bertambah lagi dengan kemunculan banteng dengan visualisasi yang berbeda dengan visualisasi banteng yang pernah ada sebelumnya. Dalam lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), banteng divisualkan tidak dalam posisi tegak kaku menghadap ke depan atau dalam posisi tengah menyeruduk, tetapi ditampilkan dalam bentuk kepala banteng dengan posisi menghadap ke depan. Posisi itu memperlihatkan sikap waspada atau sedang mengamati dan mencermati sesuatu. Menurut Nurhasim, dibanding visualisasi banteng dalam lambang PDI, visualisasi banteng dalam lambang PDIP tampak tampil lebih ekspresif, lebih hidup, dan lebih bertenaga (Nurhasim, 2009: 76-81). Untuk menjadikan lambang PDIP tampil sesuai dengan semangat perubahan dan reformasi, PDIP menggunakan jasa perusahaan iklan EURO RSCG AdWork, milik Triawan Munaf. Setidaknya ada sepuluh jenis lambang PDIP yang kaya akan variasi warna yang ditawarkan Triawan Munaf kepada Megawati Soekarnoputri dan para petinggi PDIP lainnya. Dari kesepuluh jenis lambang tersebut, lambang PDIP sebagaimana yang digunakan sekaranglah yang kemudian dipilih Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam hal warna, terjadi dinamika visual. Banteng pada lambang sebelumnya berwarna hitam, kemudian mengalami pengayaan warna. Lambang partai-partai politik yang menggunakan banteng dalam lambangnya, sejak Pemilu 1999 tidak lagi diwarnai hitam dan putih, tetapi juga warna merah. Warna merah dalam lambang partai-partai politik yang memilih banteng sebagai salah satu elemen visualnya, pada umumnya digunakan sebagai warna dasar. Realitas ini tentu tidak sekedar ingin memperlihatkan keberanian partai-partai politik tersebut, tetapi lebih dari itu. Melalui penggunaan warna merah sebagai warna dasar, partai-partai politik tersebut ingin memperlihatkan identitas

partai sebagai partai yang memiliki atau setidaknya dekat dengan ideologi nasionalis. Dinamika pewarnaan paling mencolok terjadi pada Pemilu 1999, saat banteng yang digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak hanya diwarnai hitam tetapi juga warna merah dan warna putih. Merah digunakan untuk mewarnai mata, dan putih digunakan untuk mewarnai mulut banteng. Penggunaan warna merah untuk mewarnai mata banteng dan warna putih untuk mewarnai mulut banteng tentu bukan tanpa maksud. Pewarnaan putih pada mulut banteng dimaksudkan untuk menegaskan tentang putihnya nurani dalam berbicara atau untuk menegaskan tentang keberadaan PDIP sebagai partai politik yang dapat dipercaya untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sementara itu, pewarnaan merah pada mata banteng untuk menegaskan tentang keberanian dalam memperjuangkan aspirasi rakyat atau untuk menegaskan tentang sikap selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, warna merah pada mata banteng PDIP kiranya dapat pula dimaknai sebagai pertanda banteng yang tengah memendam amarah besar.

Menurut pemilik perusahaan iklan EURO RSCG AdWork, Triawan Munaf, yang mendesain lambang PDIP, penggunaan warna putih pada moncong banteng dan warna merah pada mata banteng dipengaruhi oleh iklim sosial politik saat itu, yang tengah bergerak secara dinamis, sehingga lambang dibuat untuk memperlihatkan sikap pro perubahan. Pemilihan moncong putih didasarkan pada pertimbangan agar mudah diingat publik, sementara warna merah membara pada mata untuk menunjukkan semangat orang muda untuk melakukan perubahan. Alasan PDIP hanya memilih tiga warna dalam lambangnya, yakni hitam, merah, dan putih, lebih didasarkan pada pertimbangan teknis, yakni agar lambang tersebut mudah ditiru dan dicetak oleh massa pendukung PDIP dalam berbagai

atribut partai, seperti kaos, stiker, dan umbul-umbul (Nurhasim, 2009: 76-81).

Kenyataan menunjukkan, bahwa partai politik yang menggunakan banteng sebagai lambang partai, pada umumnya adalah partai-partai politik yang memiliki kedekatan dengan ideologi nasionalis. Kedekatan terhadap ideologi nasionalis tidak selalu ditandai oleh digunakannya nasionalisme sebagai asas partai, tetapi juga ditampilkan dalam bentuk penggunaan asas lain, seperti marhaenisme atau Pancasila. Bagi PNI Front Marhaenis sebagai partai peraih kursi DPR dalam Pemilu 1955, mempertahankan Pancasila pada esensinya sama juga dengan mempertahankan marhaenis (Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia, 1954: 10). Dengan realitas visual ini, dapatlah dikatakan bahwa banteng merupakan bentuk yang dapat dikonotasikan sebagai representasi partai politik yang memiliki kedekatan dengan ideologi nasionalis atau kekuatan nasionalis.

### 3. Eksplanasi Visual

Penggunaan banteng sebagai elemen visual lambang memiliki jejak sejarah yang panjang. Penggunaan banteng sebagai lambang politik dapat dikatakan sebagai produk asli bangsa Indonesia atau murni merupakan hasil kreativitas berpikir bangsa Indonesia. Dengan kata lain, banteng sebagai lambang politik tidak ditemukan atau digunakan di tempat lain di luar Indonesia. Di Indonesia, banteng telah digunakan sebagai lambang politik oleh Sarekat Islam sejak tanggal 23 Oktober 1917 (Suryanegara, 1995: 205). Gambar banteng yang diletakkan di tengah simbol hati dalam lambang Sarekat Islam, merepresentasikan semangat perjuangan dan tekad bangsa Indonesia dalam menuntut Indonesia merdeka, laksana banteng yang siap menggempur lawan dengan segala rintangannya (Suryanegara, 1995: 206).



Gambar 6

Lambang awal Sarekat Islam, organisasi pergerakan nasional yang didirikan tanggal 10 September 1912. Sumber: Suryanegara (1995: 204); Suryanegara (2009: 367).

Meskipun penggunaan banteng sebagai lambang politik baru muncul pada awal abad ke-20, tidak berarti banteng sebagai objek visual gambar baru muncul di Indonesia pada awal abad itu. Sebelum abad ke-20, banteng sebagai representasi dari model binatang liar yang kuat telah muncul dalam objek lukisan karya bangsa Indonesia. Raden Saleh Syarif Bustaman (1814-1880) dapat dikatakan menjadi orang Indonesia pertama yang menjadikan banteng sebagai objek lukisannya (Bachtiar, 2009: 45). Karya lukis Raden Saleh tahun 1848, berjudul *Op Levenen Dood* (Antara Hidup dan Mati), yang menggambarkan pertarungan antara dua ekor singa melawan seekor banteng, merupakan lukisan pertama dan tertua yang menjadikan banteng sebagai objek visual. Lukisan yang kemudian dihadiahkan Raden Saleh kepada Raja Belanda William II pada tahun 1850, bisa jadi telah mengilhami penggunaan banteng sebagai lambang politik.





Gambar 7 Lukisan Raden Saleh Syarif Bustaman yang dibuat tahun 1848 berjudul "Antara Hidup dan Mati" (*Op Leven en Dood*).  
Sumber:  
[www.xenofobie.com/p/perspective-review.html](http://www.xenofobie.com/p/perspective-review.html),  
20 Desember 2010

Dalam perkembangannya, penggunaan banteng dalam lambang politik digunakan oleh Partai Nasional Indonesia, partai yang didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Penggunaan banteng sebagai lambang Partai Nasional Indonesia tidak berlangsung begitu saja, tetapi dilakukan Soekarno dengan terlebih dahulu meminta izin dari sang pemilik lambang, yakni Tjokroaminoto. Tjokroaminoto mengizinkan lambang banteng digunakan oleh Soekarno, antara lain disebabkan Sarekat Islam telah menyerahkannya. Lambang baru yang digunakan Sarekat Islam hanya terdiri dari dua bentuk, yakni bintang dan bulan (Suryanegara, 1995: 205-206).

Berbeda dengan Sarekat Islam, PNI menjadikan banteng sebagai satu-satunya bentuk dalam lambang partai. Banteng dalam lambang PNI tidak ditampilkan utuh satu badan, tetapi hanya ditampilkan satu bagian, yakni kepala banteng. Pemilihan kepala banteng oleh PNI menjadi representasi yang tegas mengenai perlawanan PNI terhadap belenggu kolonialis-

me. Banteng dipandang oleh PNI sebagai bentuk yang paling tepat untuk merepresentasikan tujuan PNI, yakni mencapai kemerdekaan Indonesia dengan melibatkan rakyat Indonesia secara keseluruhan (Pringgodigdo, 1980: 59).

PNI menggunakan banteng sebagai lambang partai disebabkan banteng merepresentasikan simbol keindonesiaan. Banteng dipandang sebagai binatang yang "akrab" dengan keseharian rakyat Indonesia. Melalui lambang banteng, PNI hendak menegaskan keberadaannya sebagai partai milik rakyat, yang mengajak rakyat untuk berjuang bersama mencapai kemerdekaan. Banteng oleh PNI juga dipandang sebagai representasi yang tepat dari rasa kebangsaan yang juga menjadi tujuan PNI, yakni memperkuat rasa kebangsaan umumnya dan kesadaran akan persatuan Indonesia pada khususnya.

Pilihan PNI menjadikan banteng sebagai representasi perjuangan dan kerakyatan terus melekat dalam pemahaman visual bangsa Indonesia selanjutnya. Terlebih setelah banteng dijadikan salah satu bentuk yang merepresentasikan sila Pancasila, tepatnya sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951).



Gambar 8 Lambang Garuda Pancasila. Kepala banteng ditempatkan di pojok kiri atas perisai yang merepresentasikan sila keempat Pancasila.

Latar kesejarahan banteng sebagai lambang yang digunakan oleh PNI sejak sebelum kemerdekaan, pada perkembangannya dianggap sebagai identitas kelompok nasionalis. Realitas sejarah itu terus dipelihara secara konsisten oleh kelompok nasionalis saat mendirikan partai politik pada era kemerdekaan. Lambang banteng selalu menjadi pilihan kelompok nasionalis untuk memperlihatkan identitasnya. Hal ini tampak jelas pada penggunaan lambang banteng oleh partai politik afiliasi PNI, yakni PNI Front Marhaenis (dalam Pemilu 1955 dan Pemilu 1999), PNI Massa Marhaen (Pemilu 1971 dan Pemilu 1999), PDI, PDIP dan PNBK. Perlu dikemukakan bahwa banteng yang digunakan sebagai lambang partai-partai politik, khususnya PNI, adalah sejenis sapi Indonesia asli, yang kuat dan tak mau kalah dalam mempertahankan hidup dan memelihara dirinya, anak-anaknya dan kawan-kawannya (Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia, 1954: 8). Realitas banteng seperti itulah yang menjadi alasan kuat PNI menggunakan banteng sebagai lambang partai.

Banteng pun secara budaya memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, seperti pada suku-bangsa Sunda, Jawa, Batak, Minahasa, Timor, Bali, dan Aceh. Dalam kehidupan budaya berbagai suku-bangsa di Indonesia, banteng atau sapi jantan asli Indonesia tidak saja menjadi binatang ternak yang memiliki fungsi ekonomi tinggi, tetapi juga digunakan dalam kegiatan bercocok tanam dan mengangkut hasil-hasil pertanian. Banteng atau sapi Indonesia asli adalah hewan yang banyak memberikan manfaat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Latar budaya itulah yang menjadikan banteng dijadikan sebagai lambang partai-partai politik.

Dinamika visualisasi banteng beserta warna yang terdapat dalam lambang partai-partai politik peraih kursi DPR sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999 secara implisit memperlihatkan bahwa partai-

partai politik di Indonesia secara umum memiliki kebebasan yang relatif luas dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan partainya. Lambang yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan dunia ide dengan dunia realitas tentu harus dibuat sebaik dan secermat mungkin, sehingga mampu menjadi representasi partai secara visual. Apa yang menjadi visi, misi, tujuan, dan asas partai tentulah menjadi sebagian saja dari kepentingan partai yang perlu diterjemahkan ke dalam lambang partai.

Berdasarkan fakta-fakta visual sebagaimana terlihat dari lambang partai-partai politik yang menggunakan banteng sebagai elemen visual, dapat kiranya dilakukan pembagian periodisasi atau klasifikasi atas waktu (Kuntowijoyo, 2008: 19-20) tentang transformasi visual lambang partai-partai politik di Indonesia ke dalam empat periode besar. Pertama, periode Pemilu 1955, dengan karakteristik, kaya akan ekspresi bentuk tetapi miskin akan ekspresi warna. Kedua, periode Pemilu 1971, Pemilu 1977, dan Pemilu 1982, dengan karakteristik, ekspresi bentuk tidak hanya dipagari secara eksplisit oleh sistem politik tetapi mulai dipagari secara implisit, sementara ekspresi warna tidak jauh berbeda dengan periode pertama. Ketiga, periode Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997, dengan karakteristik, ekspresi bentuk dan warna dibatasi secara eksplisit maupun implisit oleh sistem politik. Keempat, periode Pemilu 1999, dengan karakteristik, tidak hanya kaya akan ekspresi bentuk tetapi juga kaya akan ekspresi warna.

Dari periodisasi transformasi visual lambang partai-partai politik sebagaimana terurai di atas, terlihat bahwa transformasi visual lambang partai-partai politik di Indonesia bergerak dari adanya kebebasan berekspresi secara menyeluruh tetapi tidak ditunjang oleh perkembangan teknologi yang memadai, munculnya benih-benih represi visual sebagai akibat trauma politik peristiwa Gerakan 30 September 1965,

timbulnya represi visual secara sistematis pada semua ranah visual, hingga munculnya kembali kebebasan berekspresi secara visual dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat dan pesat. Realitas pembabakan visual tentang transformasi visual lambang partai-partai politik ini memperlihatkan bahwa transformasi visual lambang partai-partai politik memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem politik dan juga perkembangan teknologi. Antara sistem politik dan teknologi dalam kaitannya dengan transformasi visual lambang partai-partai politik memperlihatkan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi. Sistem politik yang terbuka memungkinkan perkembangan teknologi desain diaplikasikan pada lambang partai-partai politik. Sementara itu, sistem politik yang tidak terbuka atau otoritarian terbukti telah menutup kemungkinan bagi teknologi desain untuk menerjemahkan kemajuan yang telah dicapainya dalam membuat lambang partai-partai politik.

### C. PENUTUP

Keberadaan banteng sebagai elemen visual dalam lambang partai-partai politik memperlihatkan sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Banteng sebagai elemen visual lambang telah hadir di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Banteng sebagai lambang politik dapat dikatakan merupakan produk asli Indonesia. Adapun keberadaan banteng sebagai elemen visual lambang pertama kali digunakan oleh Sarekat Islam, sejak tanggal 23 Oktober 1917. Dalam perkembangan selanjutnya, banteng sering dipersepsikan sebagai representasi kekuatan politik nasionalis, terlebih sejak banteng dijadikan sebagai pilihan bentuk dalam lambang negara Pancasila, sejak 17 Oktober 1951.

Penggunaan banteng sebagai elemen visual lambang partai-partai politik peraih kursi DPR telah terlihat sejak Pemilu 1955. Hal ini berlangsung dalam pemilu-pemilu selanjutnya, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu

1992, Pemilu 1997, dan Pemilu 1999. Visualisasi banteng dalam lambang partai-partai politik tampak mengalami dinamika yang menarik. Visualisasi banteng dalam bentuk kepala banteng yang semula menggambarkan kepala banteng yang tengah menyeruduk, kemudian berubah menjadi kepala banteng dalam posisi tegak menghadap ke depan, seperti bentuk kepala banteng yang terdapat dalam lambang negara Pancasila, dan bentuk kepala banteng yang tengah memandang atau mencermati sesuatu, dengan mulut atau moncong berwarna putih dan mata berwarna merah. Penggunaan warna putih pada mulut banteng dan warna merah pada mata banteng merupakan hal yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, mulut dan mata banteng selalu berwarna hitam.

Disamping memperlihatkan perjalanan sejarah tentang persentuhan bangsa Indonesia dengan lambang politik, banteng juga memperlihatkan tentang sebuah dinamika kebijakan politik visual pemerintah atau penguasa. Banteng sebagai bentuk yang digunakan dalam Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999 secara implisit menampilkannya adanya dua periodisasi kebijakan politik visual pemerintah. Pertama, periode saat banteng memiliki kedudukan yang setara dengan bentuk-bentuk lainnya. Hal ini terjadi saat berlangsung Pemilu 1955, 1971, dan Pemilu 1999. Kedua, periode saat banteng memiliki kedudukan tidak setara dengan bentuk-bentuk lainnya, terkecuali dengan bentuk-bentuk yang terdapat dalam lambang negara, Pancasila, yaitu, rantai, pohon beringin, padi, dan kapas.

Banteng juga memperlihatkan sebuah realitas visual tentang kedekatan budaya bangsa Indonesia dengan banteng. Banteng atau sapi jantan asli Indonesia telah lama ramah dengan keseharian hidup berbagai suku bangsa di Indonesia. Banteng tidak saja menjadi binatang yang digunakan untuk membantu kegiatan para petani di sawah tetapi juga digunakan sebagai alat angkut dan hewan ternak yang

memiliki nilai komersial. Kedekatan masyarakat Indonesia dengan banteng secara budaya dan historis, dapat dikedepankan sebagai faktor penyebab penting terpilihnya banteng sebagai elemen visual dalam lambang partai-partai politik.

#### DAFTAR SUMBER

##### 1. Arsip

Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia. *Data Pemilihan Umum 1955 (Jumlah Kursi DPR Tiap Daerah)*. Koleksi Arsip Pemilihan Umum, 1971-1999, No. Inv. 1321, Jakarta: ANRI.

Indonesia. Arsip Nasional. *Arsip Surat Suara Pemilihan Anggota Konstituante Tahun 1954 Daerah Pemilihan Sumatera Utara*. Jakarta: ANRI.

Indonesia. Badan Perpustakaan Arsip Daerah Yogyakarta. *Harian Daulat Rakjat*, No. 287 Tahun 1955, 13 Mei 1955.

Panitia Pemilihan Daerah Tk I Jawa Barat. *Arsip Brosur Pemilu 1977*.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951, tanggal 17 Oktober 1951.

##### 2. Buku

Bachtiar, Harsja W. 2009.

"Raden Saleh: Bangsawan, Pelukis, dan Ilmuwan" dalam JJ Rizal (Penyunting), *Raden Saleh: Anak Belanda, Mooi Indie & Nasionalisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia. 1954.

*Partai Nasional Indonesia Manifesto Pemilihan Umum*. Djakarta.

Feldman, Edmund Burke. 1967.

*Art As Image And Idea*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1976 tentang Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya Yang Dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 serta Penentuan Nomor Urutnya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 1986 tentang Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya serta Penentuan Nomornya Masing-masing Yang Digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1987.

Komisi Pemilihan Umum. tth.

*Pemilu 1999 Dalam Angka*.

Kuntowijoyo. 1995.

*Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Kuntowijoyo. 2008.

*Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nurhasim, Ahmad. 2009.

"Menarik Konstituen dengan Lambang Partai", *arti*, Edisi 014, April 2009.

Pringgodigdo, A.K.1980.

*Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Rose, Gillian. 2007.

*Visual Methodologies*. Second Edition. Los Angeles-London-New

- Delhi-Singapore: Sage Publications.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suryakusuma, Julia I. tth. *API: Almanak Parpol Indonesia*. Bogor: SMK Grafika Mardi Yuana.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1995. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2009. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Tinarbuko, Sumbo. 2009. *Iklan Politik dalam Realitas Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- 3. Internet**
- [http://www.kpu.go.id/ProPartai/1971/partai\\_1971.shtml](http://www.kpu.go.id/ProPartai/1971/partai_1971.shtml)
- [www.xenofobie.com/p/perspective-review.html](http://www.xenofobie.com/p/perspective-review.html), 20 Desember 2010